

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang secara geografis sangat luas, terdiri atas ratusan etnis, bahasa dan adat istiadat yang berbeda, berbagai agama dan aliran kepercayaan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi dasar untuk menjamin hak azasi warga negara dalam menjalankan kewajiban agama secara bebas. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda tetapi tetap satu, telah menjadi semboyan Empu Tentular yang mengilustrasikan identitas bangsa Indonesia yang secara natural dan sosio kultural dibangun di atas keanekaragaman etnis, bahasa, agama dan budaya, dan kemudian secara nasional, memiliki filosofi, maksud dan tujuan yang berbeda serta memiliki karakteristik yang serba 'multi'. Dengan kata multi yang dimaksud, semboyan tersebut akan membawa dampak bagi kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan tertentu (*free-rider*).

Sebagai bagian integral bangsa, multikulturalisme termasuk kondisi sosial khas dari Sabang hingga Merauke. Dari satu sisi, keanekaragaman sosial bangsa ini menjadi lahirnya negara Indonesia, karena Indonesia dilahirkan dalam kemajemukan sosial. Namun dari sisi lain, keanekaragaman menyebabkan benturan sosial yang tidak bisa dihindarkan. Perbenturan sering terjadi karena perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan yang ingin dicapai.

Tantangan yang berkaitan dengan pluralitas tentu saja bukan hal yang baru bagi Indonesia. Secara historis, para pendiri bangsa berusaha menata relasi antarpenduduk yang beragam dengan Pancasila.

“Bangsa Indonesia pernah berhadapan dengan tugas untuk meletakkan tatanan dasar kehidupan kenegaraan bersama yang didambakan, yaitu dalam diskusi BPUPKI bulan Mei hingga Juli 1954. Pada saat itu, ada dua pandangan berhadapan satu sama lain: yang satu menginginkan agama menjadi mayoritas sebagai tatanan dasar negara, yang lain murni kebangsaan. Ternyata dua pandangan tersebut *reasonable*, karena mereka masing-masing bersedia merelakan sebagian cita-cita mereka. Penciptaan satu negara dari Sabang hingga Merauke di mana semua etnis, ras, umat beragama dan komunitas budaya dapat hidup bersama dengan baik, dengan kewajiban dan hak-hak yang sama tanpa harus melepaskan cita-cita dan keyakinan masing-masing. Seluruh pluralitas di Nusantara dapat menerima negara yang ingin didirikan sebagai rumah sendiri dan memberikan komitmen mereka kepada *overlapping consensus*, yaitu Pancasila”.¹

Bangsa Indonesia mewarisi dasar demokrasi yang kuat, yang memberikan peran publik berfikir demokratis dalam mengakomodasi kebebasan berbicara, bersikap dan bertindak sehingga dengan sendirinya memacu tumbuhnya kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain juga tumbuh semangat primordialisme yang dapat memicu terjadinya benturan etnis, umat beragama maupun kelompok

¹ F. Magnis-Suseno, *John Rawls, Keadilan dan Pancasila dalam: Berebut Jiwa Bangsa. Dialog Perdamaian dan Persaudaraan* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 174-175

yang ditandai dengan tumbuh berkembangnya mobalisasi massa dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Persoalan itu seringkali ditimbulkan karena ada prasangka-prasangka dari beberapa kelompok yang beranggapan bahwa keunikan kelompok lain dapat mengancam keunikan atau eksistensi dari kelompok tersebut. Stereotipe negatif yang beredar di masyarakat. Ini mengakibatkan semakin kuatnya ego kedaerahan yang tentu dapat mengikis nasionalisme dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada dasarnya inti dan pokok ajaran agama adalah mengajarkan perdamaian, harmoni, dan hidup berdampingan di antara umat beragama yang berbeda. Keyakinan umat manusia termotivasi untuk selalu menegakkan perdamaian. Namun, kenyataan yang terus berlanjut ini seolah memperkuat wajah agama yang terkesan ambigu sehingga menimbulkan skeptisisme sebagian orang pada agama. Dalam langkah antisipasi konflik, keterlibatan langsung pendidik dalam proses pembelajaran di sekolah mesti harus dilakukan untuk memahami secara inklusif atas tindakan diskriminasi yang bertolakbelakang dari semua ajaran samawi.

Pemahaman tentang betapa pentingnya keberagaman yang sehat, sebuah keniscayaan yang serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa, guna meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan *mindset* (pemikiran) peserta didik akan lebih inklusif untuk memahami dan menghargai keberagaman. Keberagaman diimplikasikan pendidik sebagai salah satu lembaga yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang transformasi nilai-nilai bermasyarakat

agar tercipta kesadaran atas kehendak ilahi akan makna perbedaan dalam realitas sosial di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu ada upaya atau solusi strategis yang mampu menjadi salah satu metode efektif untuk meredam konflik dan dapat menanamkan sekaligus mengubah pemikiran peserta didik agar benar-benar tulus menghargai keberagaman etnis, agama, ras, dan antargolongan, yaitu melalui pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural sebagai opsi alternatif agar proses pemanusiaan manusia dapat diaktualisasikan dengan menanamkan jiwa pluralistik dan multikulturalisme, dan kelak akan berdampak melahirkan manusia saling memahami, menghormati, dan menghargai eksistensi masing-masing dalam kehidupan damai dan demokratis.

Menurut Joppke, "*multiculturalism is an intellectual movement premised around the concepts of equality and emancipation*",² yang diartikan sebagai gerakan intelektual yang berdasarkan pada konsep-konsep persamaan dan emansipasi.

Multikultural dapat disederhanakan sebagai sifat yang menunjukkan adanya keragaman budaya dalam suatu masyarakat.³ Sedangkan menurut Celik, dari Universitas Indiana "*Multiculturalism in education may be defined as a movement*

² Ramon Maiz dan Ferran Requezo, *Democracy, Nationalism, and Multiculturalism*, (New York: Frank Cass Publisher, 2005), h. 26

³ Muhammad Yahya, "Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural", *Lentera Pendidikan* 13, no. 2 (2010): h. 178

*toward providing equal educational opportunities for everyone from different cultural, ethnic, or religious backgrounds”.*⁴

Pendidikan multikultural adalah sebuah pendidikan yang memberikan kesadaran hidup dalam beragama bagi setiap individu, dengan latar belakang budaya, etnis dan agama yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik memahami, dan mendengarkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran bersama dengan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda.⁵

Pendidikan multikultural merupakan bentuk konkrit dari salah satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat. Khususnya yang ada pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, dan umur. Dengan demikian, seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai substantif dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada peserta didik. Pada akhirnya, out-put yang dihasilkan dari sekolah tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu mengaplikasikan secara luhur akan nilai-nilai keberagaman, memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.

⁴ Rasit Celik, “A History of Multicultural Education in The USA: Origin, Approaches and Misconceptions”, *The Online Journal of New Horizons in Education* 2, no. 2 (2012): h. 2

⁵ Jeanne L. Higbee, *Multiculturalism in Developmental Education*, (Minneapolis: University of Minnesota, 2003), h. 6

Sejatinya, peran pendidik keagamaan pada saat ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya kesan yang kontras dengan multikulturalisme, agar materi agama tidak dipahami dari sisi amaliah religi semata, tetapi juga mengembangkan jiwa toleransi yang mengaktualisasikan firman Allah SWT, surah al-Kahfi, ayat 29:

“dan katakanlah: “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir”.

Ayat ini jelas memberikan pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang nilai-nilai agama dalam konteks realistik budaya bahwa Allah Swt. mendukung untuk memberikan kesempatan dalam menumbuhkembangkan jiwa toleransi antar sesama atau umat beragama.

Al-Qur'an memberikan informasi melalui beberapa ayat mengenai makna toleransi untuk mewujudkan kerukunan dalam peradaban multikultural, firman Allah SWT, surah al-Hujaraat ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”

Ayat ini menunjukkan kepada seluruh umat manusia secara universal bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dari laki-laki dan perempuan dan berkembang membuat sebuah komunitas atau kelompok yang menjadi berbagai bangsa dan etnis. Kemudian masing-masing mempunyai sifat, ciri, dan karakteristik yang berbeda agar saling mengenal satu sama lain. Semua perbedaan itu tidak mempengaruhi kemuliaan dan kehormatan seseorang, karena semua

manusia posisinya sama dihadapan Allah SWT, hanya perbedaan ketakwaan individu.⁶

Penekanan ayat ini memberikan model alternatif untuk memberikan pandangan tentang pentingnya toleransi terhadap keragaman serta perlunya membangun komunikasi dan sinergi di antara keragaman tersebut, agar terjaga kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah dan provinsi yang merupakan kewajiban seluruh warga daerah beserta instansi pemerintah lainnya.

Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembentukan Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno meresmikan Kabupaten Balangan pada tanggal 8 April 2003 yang kemudian menjadi hari jadi yang dirayakan setiap tahunnya. Motto Kabupaten Balangan adalah "Sanggam": "Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat" (bahasa Banjar, berarti: *Kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.*

Balangan mempunyai visi dalam melanjutkan pembangunan menuju Balangan yang mandiri dan sejahtera. Adapun langkah misi yang harus diupayakan agar dapat terealisasi sebagai langkah awal, salah satunya adalah

⁶ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran: Text and Translation, Islamic Book Trust*, terj. Ali Audah, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsirnya (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 1332

“Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan IPTEK dan IMTAQ dengan tetap memperhatikan kearifan lokal”.⁷

Misi ini sebagai proses enkulturasi atau proses pembudayaan agar warganya menjadi masyarakat yang berbudaya, yang menghargai perbedaan-perbedaan, baik dalam masyarakat yang bersangkutan maupun dengan masyarakat lain, yang saling mengerti atau saling memahami (*mutual understanding*), dan kemudian akan melahirkan sikap saling menghargai (*mutual respect*). Jika tercapai tingkat saling menghargai, maka sikap saling percaya (*mutual trust*) akan mendapat momentum yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Kabupaten pemekaran ini memiliki keunikan tersendiri karena sebagian dari penduduknya berasal dari suku Dayak Meratus sebagai suku asli yang berdomisili tidak tetap di pegunungan Meratus Kalimantan Selatan, dan tentu tidak semuanya menganut agama Islam. Leeming mengemukakan bahwa Dayak adalah nama penduduk asli di pulau Kalimantan yang tinggal di pedalaman, yang diistilahkan kolektif mengacu pada orang-orang non Muslim Aborigin dari selatan dan barat Borneo di Indonesia.⁹

Pada tahun 2014, penduduk Kecamatan Halong adalah pemeluk agama Islam (70%), Protestan (2,5%), Katolik (0,7%) Hindu (1,2%), dan Buddha (25%).¹⁰ Meskipun Balangan memiliki jumlah pemeluk Islam yang lebih banyak di antara

⁷ Sefek Effendie, *Pionir dan Peletak Dasar Pembangunan Balangan* (Jakarta: Indomedia, 2014), h. 62

⁸ Sulalah, *Pendidikan Multikultural Didaktika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 59

⁹ David A. Leeming, “Dyak (Dayak)” dalam *Creation Myths of the World: An Encyclopedia*, 2nd ed. Santa Barbara, Vol. 1 (California: ABC-CLIO LLC, 2010)

¹⁰ Informasi data diperoleh dari Bapak Ridaully, Kementerian Agama Kabupaten Balangan pada tanggal 9 Juli 2015

yang lain, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh agama dominan atau pun pemerintah untuk tidak menghormati agama yang berbeda.

Di Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Halong, terdapat multikultur yang tinggi dalam berbudaya, karena secara universal Kecamatan Halong mempunyai beragam etnik dan agama. Kemultian ini tidak menutup kemungkinan ketidakharmonisan antara agama sangat rentan terjadi, seperti terjadi di Kalimantan Tengah.

Pengalaman Tanasaldy menunjukkan bahwa konflik antara Dayak dan Madura sangat mudah menimbulkan permusuhan. Menurutny, stereotip negatif akan menambah rasa tidak aman di kalangan orang Dayak, meskipun tidak selalu diciptakan oleh orang Madura.¹¹

Hingga sekarang gejala multikulturalisme masih terus diperbincangkan hangat dan aktual oleh kalangan akademis. Benturan-benturan sosial dan individual masih selalu mengaitkan dengan latar belakang budaya warga negara dan agama. Kalangan *stakeholder* belum berinisiatif matang tentang pentingnya pendidikan multikultural dalam bentuk implementasi. Sehingga pada saat-saat tertentu, setiap daerah akan menghabiskan energi hanya untuk menghadapi kenyataan konfliktual.

Rawan konflik itu tidak dinafikan dalam dinamika kehidupan, dan kemungkinan akan terulang kembali. Setiap insiden atau permasalahan sederhana dapat saja menimbulkan potensi konflik yang mematikan massa. Karena itu,

¹¹ Taufiq Tanasaldy, *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan* (Netherlands: KITLV Press, 2012), h. 312

dianggap perlu dan urgen untuk melakukan antisipasi sedini mungkin dalam pemahaman multikulturalisme secara komprehensif di lingkungan sekolah.

Di antara kegalauan kalangan akademis sering dikemukakan dalam sebuah tulisan bahwa multikulturalisme di Indonesia masih bercorak butik yang dipajang sebagai dagangan sedangkan luarnya ada kesepakatan, namun di dalamnya masih menyimpan perasaan *stereotype* dan *prejudice* yang membara. Jika ada faktor pemicunya (*trigger*), akan terjadi lagi konflik sosial bernuansa agama.¹²

Meskipun sensitif dalam menimbulkan konflik, namun secara faktual kondisi Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Halong masih suasana stabil dalam keharmonisan lintas agama. Namun, peneliti merasa perlu melakukan penelitian agar dapat mengetahui bagaimana peran pendidik PAI di sekolah mengimplementasikan Pendidikan Multikultural.

Penelitian ini penting dilakukan, mengingat peran pendidik profesional pada PAI dipandang paling berpengaruh dalam menciptakan pemahaman agama inklusif di lingkungan sekolah yang multikultural, bahkan dapat dikatakan bahwa arah dan bentuk pemahaman keagamaan peserta didik tergantung pada profesionalisme sang Pendidik.

Sebelumnya, peneliti mendapatkan informasi¹³ bahwa pada saat pelaksanaan MTQ ke VIII tingkat Kabupaten Balangan pada bulan Februari 2014 di Kecamatan Halong terlaksana kerjasama antarumat beragama untuk bergotong royong di mana acara tersebut terasa suasana solidaritas nasionalis. Namun, saat

¹² Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme Menuju Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 55

¹³ Wawancara bersama Bapak Tarwoto, Pendidik PAI di SMP Negeri 1 Halong pada tanggal 26 Januari 2015

penulis sedang berada di SMA Negeri 1 Halong, proses pembelajaran yang berbeda agama nampaknya mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan yang lainnya. Bagi yang muslim, belajar seperti biasanya di kelas sedangkan non Muslim dibiarkan begitu saja tanpa ada teguran dan larangan untuk mengikuti peraturan yang disepakati di sekolah. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pemahaman mereka tentang multikulturalisme.

Di samping itu, situasi sekolah memperlihatkan kontras dari nilai-nilai luhur keagamaan. Rentan diskriminasi berangkat dari efek fanatisme yang perlu diluruskan secara obyektif oleh kalangan pendidik keagamaan di sekolah yang multikultural. Suasana egoisme keagamaan di sekolah telah mengkristal menjadi sebuah doktrin yang tidak realistis dengan apa yang terjadi di masyarakat Balangan. Kelompok atau golongan tertentu mendominasi di kalangan peserta didik bahwa superioritas yang beranggapan agamanya adalah mewarisi kebenaran abadi. Sikap eksklusif ini menjadi pertanyaan bagi peneliti, bahwa fungsi pendidik keagamaan selama ini di Kecamatan Halong menjadi tidak profesional dalam wacana keindonesiaan.

Berdasarkan peninjauan awal peneliti, ditemukan bahwa di SMA Negeri 1 Halong, peserta didik Muslim berjumlah 55 orang (53%) dan non Islam ada 47 orang (46%). Di SMP Negeri 1 Halong, peserta didik yang beragama Islam ada 83 orang (52%) dan non Islam ada 74 orang (47%). Jika dilihat dengan perbandingan yang hampir sama maka pengakuan realitas pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara agama dan kultural dalam proses pembelajaran merupakan

tanggung jawab yang sangat besar bagi pendidik PAI untuk mengantisipasi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa ini yang terdiri dari berbagai perbedaan agama dan budaya secara inklusif.

Keyakinan semua agama akan selalu berharap untuk membawa kebaikan pada sesama. Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah peran pendidik keagamaan menginterpretasikan agama sebagai penyebab terjadinya sesuatu di luar konteks Islam yang humanis dan egaliter.

Penelitian ini lebih cenderung membahas lebih dalam tentang penghargaan terhadap perbedaan yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik dimensi agama, etnis dan budaya.

Selama ini yang peneliti ketahui, proses pembelajaran pada mata pelajaran agama Islam dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

- a. Pendidik menghilangkan pendekatan yang tidak berpusat kepada peserta didik, sehingga proses pendidikan yang semestinya memberikan kebebasan untuk para peserta didik bertanya, mengkritisi, dan mempertanyakan doktrin agama terabaikan, cenderung dipaksa untuk menerima doktrin agama sebagai sesuatu yang absolut dan tidak terbantahkan.
- b. Terjadinya kekeliruan dalam memberikan informasi yang bersifat normatif, tidak kontekstual dan riil yang terjadi di masyarakat, dengan tidak mengasosiasikan ayat-ayat Tuhan dari langit dengan menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bumi sebagai realitas sosial, sehingga terlihat sindiran Paulo Freire bahwa pendidik laksana menara gading.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian di atas, fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana multikulturalisme dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus dengan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi sosial dalam pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana persepsi pendidik PAI dan peserta didik tentang multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
3. Bagaimana sikap pendidik dan peserta didik terhadap multikulturalisme di SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, dan kemudian dijabarkan menjadi tiga, yakni:

1. Interaksi sosial dalam pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

2. Persepsi pendidik PAI dan peserta didik tentang multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
3. Sikap pendidik dan peserta didik terhadap multikulturalisme di SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat berguna secara teoritis dari penelitian ini untuk dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan dan berkontribusi ilmiah serta menambah khazanah terhadap pelaku akademisi pendidikan Islam.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk memotivasi bagi para pemegang kebijakan maupun para praktisi pendidikan mengenai urgensi pendidikan multikultural.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul Tesis ini, sehingga tidak terjadi misinterpretasi pemahaman atau maksud judul yang sudah ada, maka peneliti mengemukakan definisi secara operasional dan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Multikulturalisme

Budaya adalah suatu jaringan bersama oleh sekelompok orang untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok lain. Dengan berbagai aturan perilaku,

kebiasaan, dan tradisi masyarakat terikat dan terhubung bersama-sama. Namun, budaya tidak statis, tidak seperti monumen yang dapat berdiri selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun tanpa mengubah bentuknya, tetapi dinamis dan terus menyesuaikan kebiasaan dengan zamannya. Kelahiran di tempat yang sama dan rumah orang tua yang sama, tentu memiliki suasana dan budaya yang berbeda. Kesenjangan generasi akan menggarisbawahi bagaimana budaya terus berkembang.

Istilah multikultural kadang-kadang disamakan dengan kata multietnis. Arti konsep multikulturalisme tergantung pada penggunaan tujuan. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai budaya asing, minoritas budaya, budaya yang berbeda, dan budaya imigran.

Multikultural merupakan kata kunci bagi budaya minoritas untuk mengklaim layanan, manfaat, dukungan tertentu untuk bernegosiasi di masyarakat luas.¹⁴ Multikulturalisme juga diartikan sebagai kebudayaan konstruksi sosial terhadap kesadaran untuk melihat keragaman identitas kolektif di dalam relasi sosial yang bersifat *mutual* serta memahami unsur-unsur yang bersifat *incompatible* (tidak setara) dalam masing-masing identitas kolektif suatu kelompok yang sangat potensial memicu terjadinya konflik sosial.¹⁵

Oleh sebab itu, multikultural lebih digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan

¹⁴ Mika Launikari and Sauli Puukari, *Multicultural Guidance and Counseling: Theoretical Foundations and Best Practices in Europe* (Finlandia: Centre for International Mobility CIMO and Institute for Educational Research, 2005): h. 48

¹⁵ Hags dan Schech, dalam Arie Setyaningrum, "Multikulturalisme sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada* 7, no. 2 (2003): h. 244

kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut.

2. Pendidikan

Kata pendidikan merupakan aktivitas jasmani dan rohani yang rumit, yang menyatukan semua potensi dan keistimewaannya manusia.¹⁶ Pendidikan juga dapat dimengerti sebagai usaha yang dilakukan pendidik untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam potensi peserta didik.¹⁷

Keistimewaaan manusia adalah kemampuan untuk menyadari maksimal dalam proses memanusiakan manusia dan mampu merubah perilakunya dengan nilai-nilai yang disepakati bersama berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya.

F. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian yang memfokuskan pada pendidikan multikultural dilakukan oleh Rawia Hayik dari *Academic College for Teacher Education* di Israel pada tahun 2015 dengan judul “*Addressing Religious Diversity through Children’s Literature: An “English as a Foreign Language” Classroom in Israel*”.

Ia berhasil menyimpulkan dalam 4 (empat) dimensi, yang meyakini bahwa sastra sebagai alat ampuh untuk mengurangi sikap *stereotype*. Pertama, *disrupted*

¹⁶ Amka A. Aziz. *Hati Pusat Pendidikan Karakter: Melahirkan Bangsa Berakhlak Mulia* (Klaten: Cempaka Putih, 2012), h. 40

¹⁷ Supardi, “Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi”, *Jurnal Formatif* 2, no. 2 (2012): h. 1

the commonplace adalah yang berbeda membuat diri seseorang merasa terganggu di tempat umum. Kedua, *considering multiple viewpoints* adalah mempertimbangkan dengan berbagai sudut pandang bahwa anak didik diajarkan untuk tidak termarginalkan dalam mengkritisi sesuatu secara bersamaan. Ketiga, *focusing on the socio-political*, anak didik diajarkan untuk mengkritisi sesuatu tentang isu-isu agama dengan mengekspresikan slogan-slogan yang mempromosikan kedamaian lintas agama. Keempat, *taking action to promote social justice*, anak didik dilibatkan untuk berpartisipasi dalam mempromosikan keadilan sosial melalui slogan-slogan sebagai alat aksi perdamaian.¹⁸

Sebuah penelitian lain pada tahun 2015 yang dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), juga fokusnya berdekatan dengan isu-isu multikulturalisme. Studi ini diteliti oleh Elly Malihah, Siti Nurbayani dan Supriyono berjudul “*Teaching Conflict Resolution through General Education at University: Preparing Students to Prevent or Resolve Conflicts in a Pluralistic Society*”.

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan dapat mengakibatkan konflik verbal atau fisik. Dosen memegang peranan penting dalam membantu mencegah dan menyelesaikan konflik mahasiswa. Oleh karena itu, seluruh mahasiswa diharuskan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pembelajaran.

Namun, sebagai dosen memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tentang resolusi konflik dan pencegahan kompleksitas tersebut di kalangan mahasiswa. Di samping itu, penerapan model resolusi konflik belum efektif di

¹⁸ Rawia Hayik, “Addressing Religious Diversity through Children’s Literature: An “English as a Foreign Language” Classroom in Israel”, *International Journal of Multicultural Education* 17, no. 2 (2015): h. 104

kalangan mahasiswa dikarenakan kesalahpahaman dalam pelibatan proses penyelesaian konflik atau pencegahan damai di lingkungan kampus.¹⁹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jhon W. Berry pada tahun 2005 berjudul “*Acculturation: Living Successfully in Two Cultures*”. Ia telah memfokuskan pada konflik dan negosiasi berdasarkan aspek budaya dan psikologis, kemudian yang dilihat adalah fenomena proses akulturasi. Di antara beberapa kelompok terlibat kontak lintas budaya untuk menghasilkan potensi konflik dan kebutuhan dalam bernegosiasi adaptif bagi kedua belah pihak.

Menurutnya, ada dua aplikasi yang mendapatkan perhatian dalam penelitian dan pengembangan kebijakan. Salah satunya adalah domain dari kehidupan keluarga (termasuk hubungan antara individu dalam keluarga dan antara anggota keluarga di dunia luar). Kemudian di bidang kebijakan imigrasi dan pemukiman (termasuk isu-isu perubahan lembaga-lembaga masyarakat dan promosi keanekaragaman budaya).

Sehubungan dengan akulturasi keluarga, membuktikan bahwa orang tua dan anak-anak memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan akulturasi antara orangtua dan remaja, misalnya orang tua memiliki skor yang lebih tinggi atau tanggung jawab yang lebih pada ukuran kewajiban keluarga dibandingkan anak-anak remaja. Sedangkan remaja memiliki skor lebih tinggi pada skala hak remaja, seperti kebebasan bergaul. Namun, perbedaan antara orang tua dan remaja dipandang mempunyai kewajiban keluarga yang bervariasi. Perbedaan ini adalah

¹⁹ Elly Malihah, Siti Nurbayani dan Supriyono, “Teaching Conflict Resolution through General Education at University: Preparing Students to Prevent or Resolve Conflicts in a Pluralistic Society”, *Asian Social Science* 11, no. 12 (2015): h. 353

kewajiban skor, akan tetapi tidak ada hak skor pada anak remaja yang dikaitkan dengan keterbatasan adaptasi psikologis dan sosial.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa baik variasi fungsi keluarga terkait dengan konteks ekologi yang ketergantungan pada pertanian. Kemudian konteks sosial politik, yakni pendidikan dan agama. Secara umum, keluarga yang hirarkis memiliki nilai-nilai yang lebih konservatif, dengan ketergantungan di masyarakat agraris yang beragama Kristen Ortodoks atau agama Islam. Sebaliknya, keluarga yang mapan finansial dan berpendidikan tinggi dengan tradisi keagamaan Protestan menunjukkan kurang hirarkis dan lebih mandiri.²⁰

Penelitian yang berbeda dari *Australian Research Council Federation Fellowship*, dilakukan oleh Farha Ciciek pada tahun 2010 berjudul “*Islamist Feminism? Syariah for the Empowerment of Women: the Case of Indonesia’s Pesantren al-Firdaus*”. Upaya yang dilaksanakan di Pesantren al-Firdaus desa Siraman di Jawa Tengah berusaha untuk merealisasikan keyakinan bahwa agama bukanlah sekedar teori tetapi amal perbuatan. Dalam kehidupan di Pesantren ini, agama cenderung didekati secara hukum (*law oriented*) Warga komunitas ini “dididik” agar peka dan taat hukum. Ada beragam peraturan yang harus dijalankan beserta segenap imbalan dan sanksi yang diterima jika terjadi pelanggaran. Semua itu disosialisasikan secara intensif melalui berbagai cara dan sarana. Dalam kegiatan formal (sekolah) maupun informal (kepesantrenan, ekstra kulikuler).

Namun, hasil temuan bahwa sebuah lembaga yang dicap radikal, (dan tidak setuju *gender equality* secara konseptual) semakin menegaskan makna khusus

²⁰ Jhon W. Berry, “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures”, *International Journal of Intercultural Relations* no. 29 (2005): h. 697

kekuasaan dari pandangan perempuan. Memakai momen penerapan Syariah Islam yang dinilai bahkan dirasakan sementara orang sebagai “anti kekuasaan bahkan sumber penindasan perempuan”, secara cerdas perempuan Pesantren al-Firdaus bersiasat untuk menapak kuasa. Mereka mendesak agenda pengelolaan kesantrian putri agar dilakukan oleh kaum perempuan sendiri. Kapling yang selama ini menjadi domain dan didominasi kaum lelaki dengan berbagai alasan, sosial maupun keagamaan. Di awal abad 21 ini, perempuan Al-Firdaus, desa Siraman telah berkata tidak pada sistem yang serba lelaki, mutlak lelaki.²¹

Fenomena Siraman sebagai bagian dari geliat perempuan Indonesia masa kini. Namun lebih jauh mengembangkan politik *ala* perempuan secara terbuka dan penuh percaya diri. Babak baru Pesantren al-Firdaus datang bersama muncul dan merebaknya upaya “*maistreaming*” hukum Syariah Islam di Indonesia. Komunitas al-Firdaus merupakan salah satu pihak yang *leading* dalam berbagai upaya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

²¹ Farha Ciciek, “Melawan Kekerasan yang Tidak Kasat Mata: Pergulatan Kaum Perempuan di Pesantren al-Firdaus, Siraman Jawa Tengah”, *Jurnal Maarif* 5, no. 2 (2010): h. 98

- BAB II Kajian Pustaka terdiri dari Multikulturalisme, Sejarah Pendidikan Multikultural, Karakteristik Pendidikan Multikultural, Tujuan Pendidikan Multikultural, Gerakan Pembaharuan Pendidikan Multikultural, Pendidikan Islam dan kerangka pemikiran.
- BAB III Metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- BAB IV Paparan data yang berisi gambaran umum Kabupaten Balangan, sejarah singkat SMA Negeri 1 Halong dan SMP Negeri 1 Halong, Multikultural PAI dalam proses pembelajaran dan pembahasan.
- BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

